

SKRIPSI

**POLA KEMITRAAN PEMERINTAH DESA DENGAN MASYARAKAT
DALAM MEWUJUDKAN DESA SADAR WISATA DI DESA REMPEK
KECAMATAN GANGGA KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2023**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram**



**PROGRAM SARJANA ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**POLA KEMITRAAN PEMERINTAH DESA DENGAN MASYARAKAT
DALAM MEWUJUDKAN DESA SADAR WISATA DI DESA REMPEK
KECAMATAN GANGGA KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2023**

Oleh:

BAIQ RINTA FARADILA

NIM. 2019B1D016

**PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN**

Telah Diperiksa dan Disetujui untuk Diuji pada ujian skripsi
Mataram, 30 Juni 2023

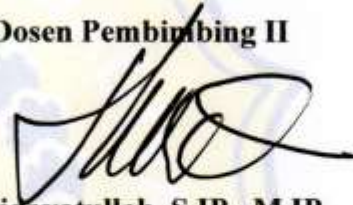
Menyetujui:

Dosen Pembimbing I



Dr. Rossi Maunofa Widayat, S.IP., M.A
NIDN. 0825118501

Dosen Pembimbing II



Hidayatullah, S.IP., M.IP
NIDN. 0809038902

Menyetujui

**Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**



Udhi Ustunata, S.IP., M.IP
NIDN. 0827118801

LEMBAR PENGESAHAN

**POLA KEMITRAAN PEMERINTAH DESA DENGAN MASYARAKAT
DALAM MEWUJUDKAN DESA SADAR WISATA DI DESA REMPEK
KECAMATAN GANGGA KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN
2023**

Oleh:

BAIQ RINTA FARADILA
NIM. 2019B1D016

Telah Dipertahankan Didepan Penguji
pada tanggal 30 Juni 2023
Dinyatakan Telah Memenuhi syarat kelulusan

Tim Penguji

1. **Dr. Rossi Maunofa Widayat, S.IP., M.A**
NIDN. 0825118501

(.....)
Ketua Penguji

2. **Hidayatullah, S.IP., M.IP**
NIDN. 0809038902

(.....)
Penguji Pendamping

3. **Lalu Hendra Maniza, S.Sos., M.M**
NIDN. 0828108404

(.....)
Penguji Netral

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

(.....)
Yudhi Nestanata, S.IP., M.IP
NIDN. 0827118801

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

(.....)
Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik baik di baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH maupun di Perguruan Tinggi lainnya, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Mataram, 30 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



Baiq Rinta Faradila
2019B1D016



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Baiq..Rinta..Faradila.....
 NIM : 2010810016.....
 Tempat/Tgl Lahir : Gangga, 19. Mei.. 2000.....
 Program Studi : Ilmu..Pemerintahan.....
 Fakultas : Ilmu..Sosial..dan..Politik.....
 No. Hp : 082339237751.....
 Email : rntafaradila00@gmail.com.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Pola..Kemitraan....Pemerintah....Desa...Dengan...Masyarakat....Dalam..Mewujudkan
 Desa..Sadar..Wisata..Di..Desa...Rempok..Kecamatan...Gangga...Kabupaten..
 Lombok...Utara...Tahun...2023.....

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 46%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, ...20... Juli.....2023

Penulis



Baiq..Rinta..Faradila.....
 NIM 2010810016

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
 MIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Baig... Rinta... Faradila.....
NIM : 2019B1D016.....
Tempat/Tgl Lahir : Gangga., 19. Mei. 2000.....
Program Studi : Ilmu... Pemerintahan.....
Fakultas : Ilmu... Sosial dan Politik.....
No. Hp/Email : 082339237751 / rinta.faradila00@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Pola... Kemitraan... Pemerintah... Desa... Dengan... Masyarakat... Dalam... Mewujudkan
Desa... Sadar... Wisata... Di Desa... Rempok... Kecamatan... Gangga... Kabupaten...
Lombok... Utara... Tahun... 2023.....

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram,20.....Juli.....2023

Penulis



Baig... Rinta... Faradila.....
NIM. 2019B1D016

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



an/ Iskandar, S.Sos., M.A. wy
NIDN. 0802048904

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.

Qs. Al-Baqarah: 286

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya”.

HR. Thabrani & Daruquthni

“Jangan pernah menyalahkan siapapun dalam hidupmu.

Orang baik memberimu kebahagiaan

Orang jahat memberimu pengalaman

Orang buruk memberimu pelajaran

Dan orang terbaik memberimu kenangan”.

Daniel Braga



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur saya ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya saya masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Pola Kemitraan Pemerintah Desa Dengan Masyarakat Dalam Mewujudkan Desa Sadar Wisata Di Desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023”** dapat di selesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk melakukan penelitian guna mendapatkan Gelar Sarjana S1 Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Pada kesempatan ini pula saya sampaikan terimakasih kepada semua pihak, khususnya teman-teman memberikan saran yang sangat berharga. Akhir kata, semoga segala upaya yang saya lakukan dapat bermanfaat bagi para pembaca terutama di lokasi penelitian.

1. Bapak Drs. Abdul Wahab,. MA. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si. Selaku Dekan Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Dr. Rossi Maunofa Widayat, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memeberikan bimbinganya kepada penulis sehingga Skripsi skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Bapak Hidayatullah, S.IP., M.IP. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbinganya kepada penulis sehingga Skripsi skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Orang Tua dan Saudara/i saya tercinta yang selalu memberikan saya do'a, dukungan, sekaligus penyemangat dan motivasi hidup, sehingga dalam penulisan Skripsi ini, bisa diselsaikan dengan baik.
7. Para Dosen yang tentunya tidak dapat satu-persatu penulis sebutkan yang membagikan pengalaman serta ilmu pengetahuan dalam penyusunan Skripsi skripsi ini.
8. Teman-teman saya Astri Komala Yunda, Ayu Tri Utami Letik, Ismi Cahya Topani, Ayu Kurniasi, Anggun Putri Wulandari dan Salma Wati yang selalu memberikan dukungan-dukkungan dan semangat, sehingga dalam penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam penyusun Skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan atau kesalahan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun.

Mataram, 24 Juli 2023

Penulis,

Baiq Rinta Faradila

POLA KEMITRAAN PEMERINTAH DESA DENGAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN DESA SADAR WISATA DI DESA REMPEK KECAMATAN GANGGA KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2023

Baiq Rinta Faradila

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengidentifikasi dan memahami pola kemitraan yang terjalin antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam mewujudkan desa sadar wisata dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pola kemitraan di Desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada 17 responden, yang terdiri dari kepala desa, sekertaris desa, staf desa, pokdarwis dan masyarakat. Selain itu peneliti mengumpulkan data melalui observasi dan dokumentasi. Dan juga dalam pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola kemitraan pemerintah desa dengan masyarakat dalam tata kelola pariwisata di Desa Rempek Kabupaten Lombok Utara belum berjalan secara maksimal efisiensi kemitraannya dan belum bekerja sama secara lebih dekat. Namun sudah ada rasa saling peduli satu sama lain sehingga memberikan keuntungan masing-masing untuk kedua belah pihak yaitu keuntungan bagi pemerintah desa dari kemitraan ini adalah dapat meningkatkan PAD maka pemerintah dapat membuka tempat pariwisata baru di desa Rempek. Sedangkan keuntungan yang diperoleh masyarakat yaitu mereka mendapatkan upah yang cukup untuk menafkahi kebutuhan hidup mereka.

Namun penelitian ini juga menunjukkan beberapa permasalahan pada Pemerintah Desa dan masyarakat harus lebih giat-giat untuk mengelola dan mempromosikan objek pariwisata Desa Rempek agar jumlah kunjungan wisatawan asing maupun lokal tiap tahunnya semakin meningkat. Pemerintah desa harus lebih berupaya meningkatkan SDM seperti membuka sekolah khusus untuk privat bahasa Inggris agar masyarakat lokal bisa dengan mudah berbicara dengan para wisatawan asing.

Kata kunci: *Pola Kemitraan, Pemerintah Desa, Masyarakat dan Sadar Wisata*

**PATTERNS OF PARTNERSHIP BETWEEN VILLAGE GOVERNMENT AND
COMMUNITY IN REALIZING A TOURISM-AWARE VILLAGE IN REMPEK
VILLAGE, GANGGA SUB-DISTRICT, NORTH LOMBOK DISTRICT, 2023**

Baiq Rinta Faradila

ABSTRACT

This research aims to identify and understand the partnership patterns between the village government and the community in realizing a tourism-aware village and determine the factors influencing the partnership patterns in Rempek Village, Gangga Sub-district, North Lombok District. This study employs a qualitative methodology, and data were acquired through in-depth interviews with 17 respondents, including the village head, village secretary, village staff, and members of the local tourism awareness group (Pokdarwis). Observation and documentation were also utilized to collect data and sample by design. The research findings indicate that the partnership pattern between the village government and the community in tourism governance in Rempek Village, North Lombok District, has not been completely effective. There is a need for closer cooperation. However, there is a mutual sense of concern between the two parties, resulting in benefits for both. This partnership enables the government to establish new tourist destinations in Rempek Village by generating additional revenue (PAD). Appropriate wages provide the community with the means to support themselves. However, this research also reveals several challenges the Village Government and community must address. They must actively manage and market the tourist attractions of Rempek Village to attract more foreign and domestic tourists annually. The village government should improve its human resources by establishing English-learning academies, allowing the local populace to communicate with foreign tourists more readily.

Keywords: *Partnership Patterns, Village Government, Community, Tourism Awareness*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM _____



DAFTAR ISI

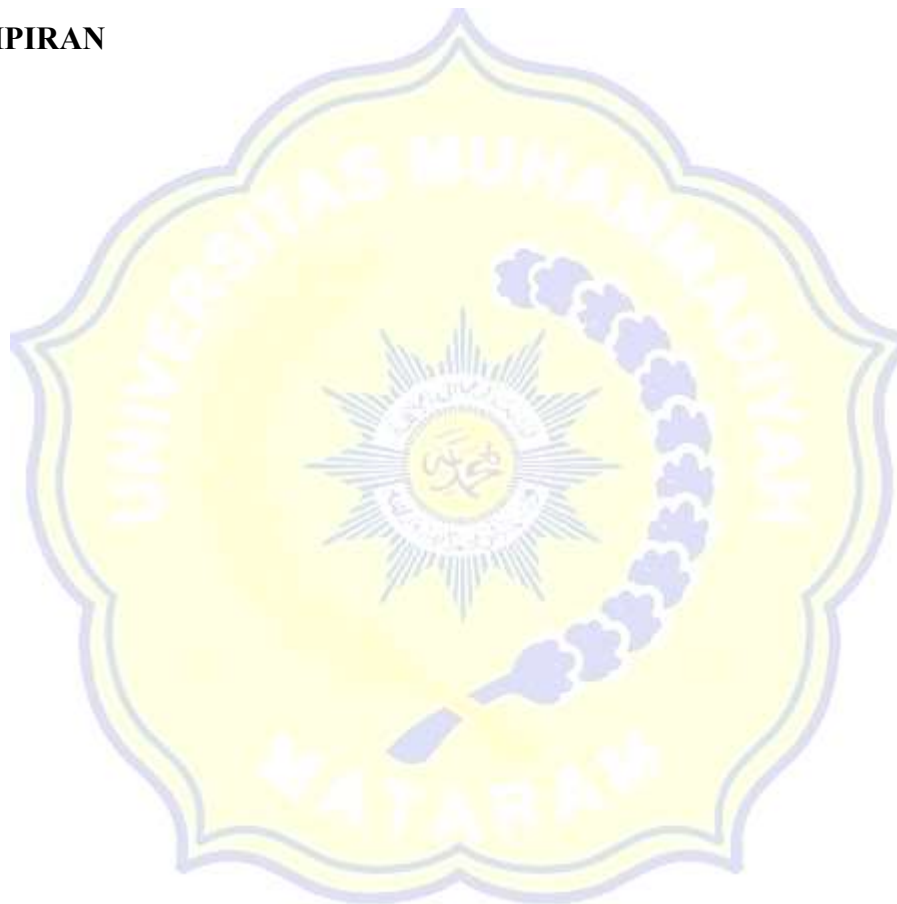
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Kemitraan.....	17
2.2.1 Definisi Kemitraan	17
2.2.2 Pola Kemitraan.....	17
2.2.3.1 Faktor Komunikasi	22

2.2.3.2 Faktor Kerjasama	22
2.2.3.3 Faktor Kepercayaan.....	23
2.2.3.4 Faktor Komitmen	24
2.3 Pariwisata.....	24
2.3.1 Definisi Pariwisata	24
2.3.2 Destinasi Wisata.....	26
2.3.3 Aktor Yang Berperan Dalam Pembangunan Kepariwisataaan	27
2.3.4 Sadar Wisata.....	28
2.4 Kerangka Berfikir Penelitian	31
2.5 Definisi Konseptual	32
2.6 Definisi Operasional	32
BAB III.....	37
METODE PENELITIAN	37
3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Lokasi penelitian	37
3.3 Fokus Kajian	37
3.4. Waktu Penelitian.....	37
3.5.Sumber dan Jenis Data.....	38
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.7. Teknik Analisis Data.....	40
3.8. Pemeriksaan Keabsahan Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
4.1 Gambaran Umum Desa Rempek	46
4.2 Pola Kemitraan Antara Pemerintah Desa Dengan Masyarakat	

Dalam Mewujudkan Masyarakat Sadar Wisata Di Desa Rempek ...	54
4.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pola Kemitraan Di Desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	88
5.1 Kesimpulan.....	88
5.2 Saran	89

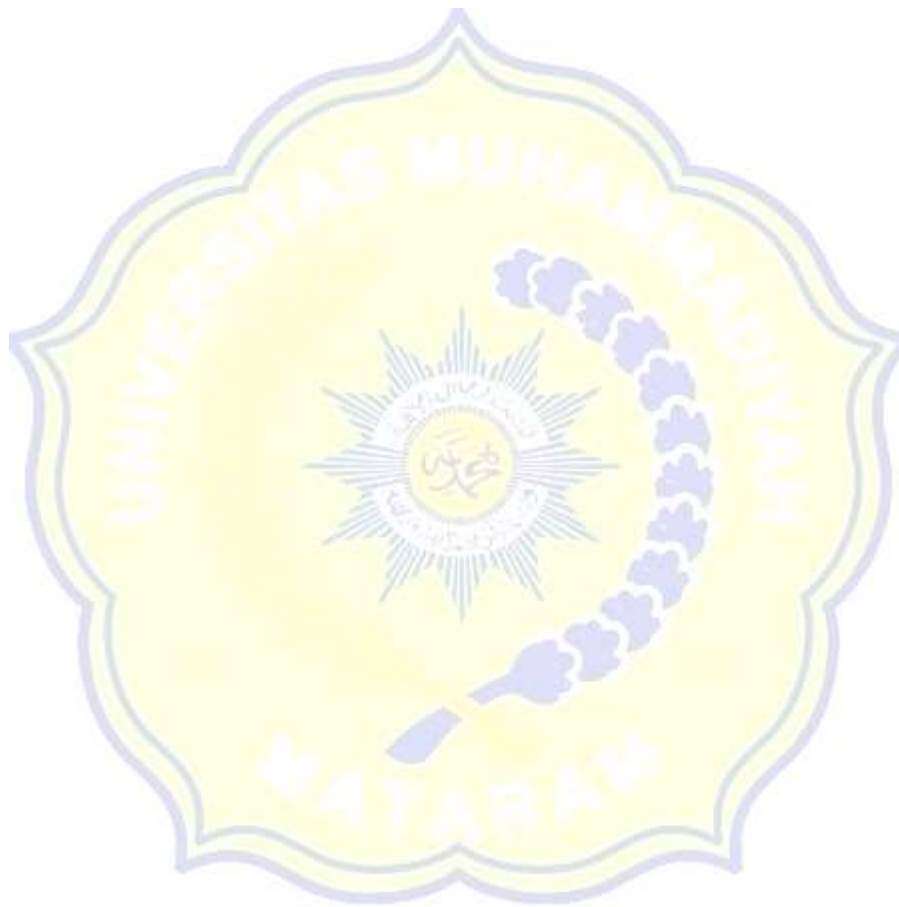
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



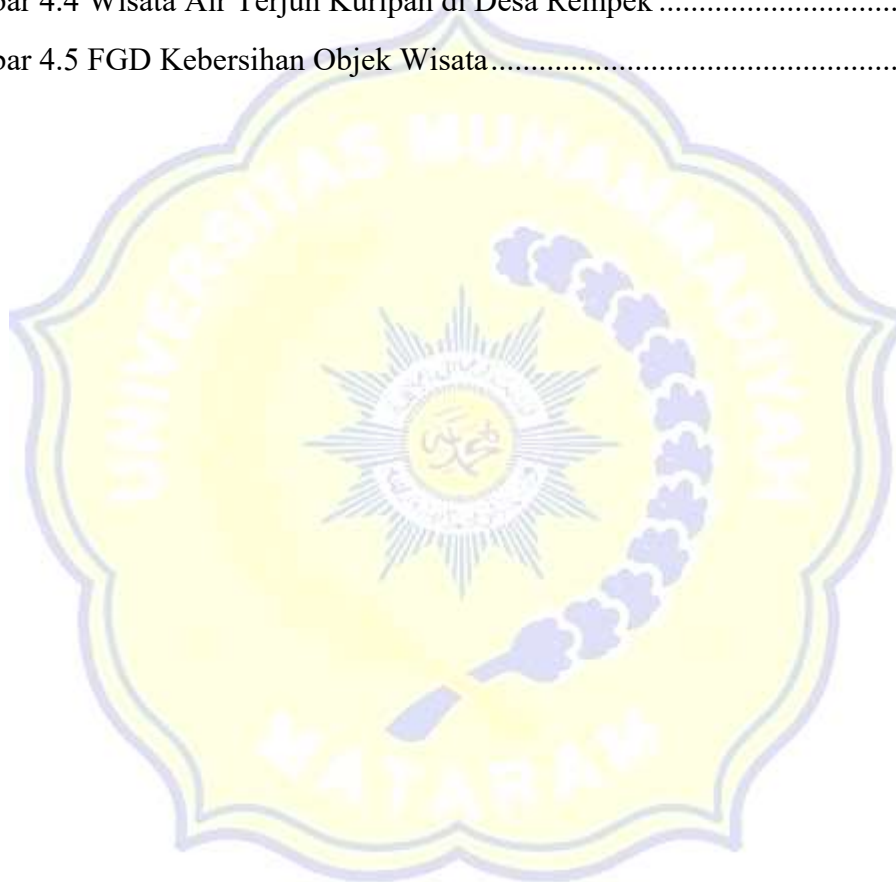
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	13
Tabel 3.1 Daftar Informan	43
Tabel 4.1 Total Pengunjung Wisata di Desa Rempek Tahun 2018-2022	55
Tabel 4.2 Jenis Pembangunan dan Anggaran Tahun 2020-2022.....	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tiga Pilar Utama	30
Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian	33
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Rempek	48
Gambar 4.2 Wisata Pantai Tebing di Desa Rempek	49
Gambar 4.3 Wisata Air Terjun Pangung di Desa Rempek	50
Gambar 4.4 Wisata Air Terjun Kuripan di Desa Rempek	53
Gambar 4.5 FGD Kebersihan Objek Wisata.....	77



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata di Indonesia memiliki banyak sekali kekayaan hayati dan non hayati sehingga mampu menambah pendapatan daerah serta mensejahterakan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pariwisata sebagai suatu aktivitas adalah suatu fenomena sosial yang sangat kompleks dan menyatu dalam segala aspek kehidupan manusia.

Pariwisata ialah keseluruhan kegiatan untuk penataan dan pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan berwisata, sehingga memiliki dampak yang besar sekali terhadap sistem nilai masyarakat, baik dampak yang bersifat positif maupun dampak yang bersifat negatif. Dalam pengelolaannya, sektor-sektor pengembangan pariwisata tersebut baik pemerintah, pengusaha atau swasta dan masyarakat memiliki peran penting untuk keberhasilan pariwisata di suatu daerah. Terkait hal tersebut pola pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh berbagai strategi dalam pengembangan pariwisata yang melibatkan Pokdarwis sangat dibutuhkan, karena dalam hal ini Pokdarwis sangat berperan penting memajukan pariwisata. Maju atau tidaknya suatu obyek wisata tergantung dengan Pokdarwis itu sendiri, karena Pokdarwis nantinya akan turun langsung ke lokasi berinteraksi dengan para wisatawan. (Karim et al., 2017)

Masyarakat yang merupakan salah satu *stakeholder* (selain pemerintah dan swasta) dalam dunia kepariwisataan berkedudukan sebagai tuan rumah, memiliki sumber daya berupa adat istiadat, tradisi dan budaya untuk menunjang keberlangsungan pariwisata. Selain itu masyarakat dapat berperan sebagai pelaku pengembangan kepariwisataan sesuai kemampuan yang dimiliki. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedudukan masyarakat memiliki peran yang strategis dalam upaya pengembangan kepariwisataan di daerah (Siregar et al., 2013)

Pokdarwis pada dasarnya mengacu pada organisasi atau lembaga ditingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari pelaku kepariwisataan dan memiliki kepedulian serta tanggung jawab yang berperan sebagai penggerak dalam mengembangkan kepariwisataan dan dapat meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan bagi masyarakat sekitar objek wisata. Serta memiliki peran meningkatkan pemahaman dan kepedulian kepariwisataan dan dapat meningkatkan nilai kepariwisataan bagi masyarakat ((Emi Salmah et al., 2021).

Pemberdayaan yaitu suatu cara yang mana rakyat, masyarakat, organisasi, komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya. Pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja, dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup mandiri (Yatmaja, 2019).

Mencapai kondisi masyarakat yang berdaya proses awal yang harus dilaksanakan adalah pengembangan kapasitas masyarakat, karena dari kondisi awal masyarakat yang belum berdaya. Masyarakat harus disadarkan terlebih dahulu tentang seluruh potensi, peluang, dan kemampuan yang mereka miliki untuk kemudian diberikan pemahaman bahwa untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik hanya mereka sendiri yang dapat mengusahakannya karena merekalah yang mengetahui kebutuhan dan peluang-peluang yang ada. Pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk membangun kemandirian, meningkatkan *bergaining position* terhadap pemerintah dan swasta dalam menentukan kebijakan pembangunan wilayah, memperkuat akses ekonomi politik kelembagaan sosial masyarakat serta jaringan kerjasama dengan berbagai pihak. (Rahman et al., 2021)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan melaksanakan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang dimiliki. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, salah satu implementasi dari kewenangan tersebut adalah desa berkewajiban untuk membuat peraturan desa yang mengatur tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 3 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di desa menyatakan Badan Permasyarakatan Desa bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa

dan Kepala Desa menyusun peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa. Peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa inilah yang dikenal sebagai produk hukum desa. Ketiga produk hukum desa ini harus dilihat secara komprehensif sehingga terdapat kejelasan dalam pelaksanaan dan kewenangannya, dan produk hukum desa ini harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah dan teknik penyusunannya. Penyusunan Peraturan Desa pada dasarnya bertujuan untuk mengatur ketertiban dan keteraturan seluruh masyarakat desa salah satunya peraturan pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah dibangun pemerintah.

Dalam PERDA (Peraturan Daerah) Provinsi NTB. No. 2 Tahun 2016, Tentang Pariwisata Halal Pasal 7 bahwa Pemerintah Daerah dapat mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri dan memanfaatkan segala sumber daya yang ada untuk pembangunan sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan tentunya dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara pun mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam rangka melaksanakan otonomi daerah tersebut, salah satunya dengan memberikan dukungan khusus kepada Pemerintah Desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara membebaskan masyarakat membentuk kelompok sadar wisata sendiri di tiap-tiap desa atau dusun sebagai bentuk solidaritas masyarakat akan desa wisata mengingat Kabupaten Lombok Utara khususnya desa Rempek sendiri merupakan wilayah pegunungan yang memiliki kekayaan alam dan

budaya yang potensial dalam pembangunan di sektor kepariwisataannya (Emi Salmah et al., 2021)

Implementasi dari Perda di atas dan sesuai dengan PERBUP (Peraturan Bupati) Lombok Utara nomor 23 Tahun 2021 tentang otonomi daerah salah satunya melakukan sosialisasi sadar wisata yang merupakan awal yang diberikan kepada masyarakat desa Rempek. Dalam sosialisasi ini memberikan pengetahuan dasar mengenai pengertian wisata, desa wisata, sapta pesona kepariwisataan dan menjelaskan pentingnya partisipasi dan dukungan masyarakat dalam mendorong berkembangnya kepariwisataan di suatu wilayah.

Desa Rempek yang akan dijadikan sebagai daerah wisata selanjutnya diberikan sosialisasi mengenai apa saja yang dibutuhkan dalam membentuk desa wisata. Sosialisasi yang dilakukan ini juga memberikan pengetahuan mengenai cara perizinan desa wisata, hak dan kewajiban, larangan dan sanksi dalam pengelolaan desa wisata. Selain itu, dalam sosialisasi ini juga dilakukan pendataan potensi wisata yang dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata. Pendataan ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara. Sosialisasi ini juga menjelaskan lagi pentingnya peran dan dukungan masyarakat dalam pengembangan desa wisata (Emi Salmah et al., 2021)

Konsep desa wisata menurut Nuryanti (dalam Edwin, 2015:154) adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Potensi wisata desa Rempek cukup beragam, mulai

dari wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah dan kerajinan. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa desa wisata Rempek ini memiliki banyak potensi wisata, seperti Air Terjun Kahuripan, Air Terjun Erat Panggung dan Pantai Tebing.

Berdasarkan hasil penelitian awal dari peneliti dalam meningkatkan kualitas desa wisata juga tak terlepas dari peran pemerintah sebagai fasilitator dan masyarakat desa sendiri meliputi aparat desa melalui Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata), PKK dan juga Karang Taruna.

Pemerintah desa Rempek menjelaskan bahwa, prasarana wisata yang dimaksud adalah sumber daya alam dan buatan yang dimiliki oleh sebuah desa wisata. Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan masyarakat Desa Rempek pada Tahun 2021 juga telah membersihkan lingkungan di obyek wisata dan menata obyek-obyek wisata yang masih terlantar sehingga dapat dinikmati oleh wisatawan. Meskipun secara keseluruhan prasarana dasar wisata tersedia, tetapi masih ada beberapa prasarana wisata yang tidak tersedia seperti akses jaringan komunikasi. Selain itu, prasarana penting seperti perbaikan akses jalan menurut pengakuan pokdarwis, pemerintah desa masih belum banyak melakukan pengembangan karena pemerintah desa belum mempunyai dana/anggaran untuk mengembangkan ataupun menyediakan prasarana wisata. Maka, dalam meningkatkan kualitas desa wisata juga tak terlepas dari peran pemerintah sebagai fasilitator dan masyarakat desa sendiri meliputi aparat desa melalui Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata), PKK dan juga Karang Taruna.

Hal ini kemudian menjadi salah satu misi Pemerintah Desa Rempek yaitu mewujudkan desa Rempek sebagai salah satu daerah tujuan wisata atau *tourism destination*. Dengan harapan, bahwa desa Rempek dapat menjadi daerah yang unggul di bidang kepariwisataannya, dapat menarik perhatian banyak wisatawan untuk berkunjung dan pada akhirnya akan memberi dampak positif terhadap

pembangunan daerah yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara. Realitas bahwa Kabupaten Lombok Utara memiliki potensi daya tarik wisata baik sumber daya alam maupun budaya yang terbilang cukup banyak dan tersebar di setiap wilayah kecamatan, tentu dapat menunjang sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberikan efek positif bagi perekonomian masyarakat apabila dikembangkan secara maksimal dan profesional. (Sumber: BPS Kabupaten Kabupaten Lombok Utara 2020)

Berdasarkan observasi awal peneliti di peroleh informasi bahwa pengelolaan masyarakat dengan pemerintah dalam mewujudkan desa sadar wisata di desa Rempek serta bagaimana implementasi pola kemitraan oleh *stakeholders* (Pemerintah Desa & Masyarakat) dalam rangka mewujudkan desa sadar wisata.

Dalam *interview* beberapa waktu lalu, bapak Rudi Artono (2022) selaku Kepala Desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara mengatakan bahwa:

Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Desa Rempek sudah disiapkan namun belum di sahkan secara resmi, karena terdapat beberapa faktor penghambat yaitu kurangnya pemahaman pokdarwis terkait dengan program yang akan dijalankan. Selain itu kurangnya harmonisasi internal dikarenakan perbedaan etnik. Dalam kondisi ini bisa dikatakan bahwa faktor penghambat partisipasi masyarakat dikarenakan faktor internal atau yang berasal dari masyarakat sendiri. Hambatan lainnya adalah pola masyarakat yang heterogen, hal ini dapat mengakibatkan timbulnya persaingan dan prasangka dalam sistem kemasyarakatan. (wawancara 6 januari 2023)

Berdasarkan dari hasil ketiga inovasi terkait dengan potensi wisatanya peneliti lebih tertarik membahas tentang pokdarwis. Hal ini dikarenakan

pokdarwis mempunyai peranan penting dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap bidang pariwisata. Pokdarwis ini sendiri merupakan kelompok baru yang dibentuk untuk mengelola dan mengembangkan pariwisata yang ada. Sejauh ini walaupun masih terbilang kelompok baru pokdarwis yang ada di desa Rempek tersebut secara bertahap mampu memanfaatkan potensi lokal dan dapat membuat perubahan yang mensejahterakan masyarakat sekitarnya. Sehingga dalam penelitian kedepan peneliti akan melihat pokdarwis dari sisi kinerja pelaksanaannya. Dari permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pola Kemitraan Pemerintah Desa Dengan Masyarakat Dalam Mewujudkan Desa Sadar Wisata Di Desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pola kemitraan yang terjalin antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat sadar wisata di desa Rempek, Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pola kemitraan di desa Rempek kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan memahami pola kemitraan yang terjalin antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat sadar wisata di Desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pola kemitraan di Desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti diharapkan menghasilkan dan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis atau keilmuan yaitu manfaat yang ditujukan oleh peneliti dalam menginformasikan bagaimana pemerintah desa dengan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat sadar wisata di desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, serta menambah wawasan bagi penulis dan pembacanya dan menjadi arsip kepustakaan.
2. Manfaat praktis agar pemerintah Kabupaten Lombok Utara mengetahui dan memahami bagaimana pemerintah desa dengan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat sadar wisata di desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara.
3. Manfaat akademis sebagai salah satu syarat utama untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelusuran terhadap studi karya-karya terdahulu atau penelitian sebelumnya yang berdekatan atau berkaitan topiknya dengan penelitian yang sedang dilakukan untuk menghindari duplikasi, plagiasi menjamin keaslian dan keabsahan penelitian yang dilakukan.

1. Penelitian yang berbentuk skripsi, dengan judul “Pola Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Kelompok Sadar Wisata Pandawa Dieng Kulon Dalam Pengembangan Pariwisata” yang disusun oleh Dyah Uswatun Khasanah (2015). Kesimpulan dari Pola Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Kelompok Sadar Wisata yaitu : Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kemitraan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Kelompok Sadar Wisata cukup berhasil, terlebih dalam hal pembinaan masyarakat untuk mengubah mainset akan pentingnya menjaga alam serta menyadarkan masyarakat untuk sadar wisata. Dari keberhasilan ini tentunya mainset akan pentingnya menjaga alam serta menyadarkan masyarakat untuk sadar wisata. Dari keberhasilan ini tentunya berdampak positif terhadap masyarakat yaitu meningkatnya pendapatan sehingga mengubah taraf kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kesejahteraan masyarakat meningkat. Hanya saja, kemitraan yang dilakukan sebatas pembinaan terhadap masyarakat dan belum adanya pengembangan pada objek –objek wisata. Kurangnya pengawasan terhadap ketertiban pedagang serta kebersihan maupun kenyamanan dalam hal kuliner. Selanjutnya dalam bidang promosi masih kurang gencar dilakukan oleh pemerintah.

2. Penelitian selanjutnya, skripsi yang berjudul “Pola Kemitraan dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah” yang disusun oleh Serly Wulandari dan Sari Indah Murwani (2018). Kesimpulan dari Pola Kemitraan dalam pengembangan pariwisata yaitu : Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kemitraan dalam pengembangan pariwisata di Purbalingga telah berjalan cukup baik namun tidak optimal. Hal ini didasarkan pada analisis tiga prinsip penting 8 kemitraan dan kesetaraan atau keseimbangan, transparansi dan kebersamaan. Model kerja sama yang dibangun oleh perusahaan swasta dan pemerintah dalam pengembangan pariwisata dalam model kemitraan semu, atau persatuan kemitraan bawahan.
3. Penelitian selanjutnya, skripsi yang berjudul “Pola Kemitraan Pariwisata Dalam Manajemen atraksi Desa Wisata Pampang Kota Samarinda” yang disusun oleh Ami Suswan Putra (2013). Kesimpulan dari Pola Kemitraan Pariwisata Dalam Manajemen atraksi Desa Wisata yaitu :Hasil penelitian didapatkan model kemitraan tergolong dalam kemitraan semu dan gabungan subordinatif. Pola kemitraan didominasi pola yang bersifat bantuan, meliputi Bantuan Dana Hibah baik fisik maupun program PNPM Mandiri Pariwisata, Investasi Swasta, CSR, Bantuan Pinjaman Dana Bergulir (KUD), Subkontrak dan Dagang Umum.
4. Penelitian selanjutnya, skripsi yang berjudul “Sinergi Kemitraan Antara Pemerintah, Swasta, Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Pedesaan Tanjung Di Kabupaten Sleman” yang disusun oleh RR. E. Anggraeni Eksi Wahyuni (2014). Kesimpulan dari Hasil dalam penelitian yang dilakukan oleh

RR. E. Anggraeni Eksi Wahyuni yaitu menunjukkan sinergi Anggraeni Eksi Wahyuni yaitu menunjukkan sinergi antara pemerintah (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata), swasta (biro perjalanan wisata) dan masyarakat (masyarakat lokal) dalam pengembangan wisata pedesaan Tanjung.

5. Penelitian selanjutnya, skripsi yang berjudul “Pola Kemitraan Pemerintah Desa Dengan Masyarakat Dalam Pengelolaan Rumah Adat Uma Ncuhi Untuk Mewujudkan Pembangunan Pariwisata Di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima” yang disusun oleh Susisusanti (2021). Kesimpulan dari Hasil dalam penelitian yang dilakukan oleh Susisusanti yaitu: Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, Pola Kemitraan Pemerintah Desa Dengan Masyarakat Dalam Pengelolaan Rumah Adat Uma Ncuhi Untuk Mewujudkan Pembangunan Pariwisata di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima belum berjalan dengan baik. Pada dasarnya baik itu Pemerintah Desa maupun Masyarakat belum memahami dengan benar esensi kemitraan dan tujuan dari kemitraan itu bagi proses pembangunan kepariwisataan.

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Hasil
1.	Pola Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Kelompok Sadar Wisata Pandawa Dieng Kulon Dalam Pengembangan Pariwisata	Dyah Uswatun Khasanah (2015)	Berdasarkan temuan penelitian ini, hubungan antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Kelompok Sadar Wisata sangat efektif. Hal ini terutama berlaku dalam hal pengembangan masyarakat untuk mengubah sikap tentang pentingnya menjaga lingkungan dan menyadarkan masyarakat akan nilai pariwisata. Pencapaian tersebut tentunya akan memberikan pengaruh yang baik bagi masyarakat yaitu peningkatan pendapatan yang akan berujung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat yang pada akhirnya akan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hanya saja, kerjasama yang terjalin belum sampai pada pembuatan tempat wisata, melainkan hanya fokus pada edukasi masyarakat setempat. Kurangnya kenyamanan bagi para pedagang, serta kurangnya kebersihan dan kenyamanan dalam hal pengalaman makanan. Selain itu, pemerintah belum melakukan promosi secara aktif karena masih dalam bidang promosi.
2.	Pola Kemitraan dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah.	Serly Wulandari dan Sari Indah Murwani (2018)	Berdasarkan temuan penelitian, sistem kemitraan pengembangan pariwisata di Purbalingga sudah berjalan cukup baik, meski belum berjalan maksimal. Pemeriksaan atas ketiga prinsip dasar ini—kebersamaan, kesetaraan, dan kemitraan—memberikan dasar untuk kesimpulan ini. Model kerjasama aliansi kemitraan

			bawahan adalah salah satu yang telah dikembangkan oleh perusahaan swasta dan pemerintah dalam proses pengembangan wisata.
3.	Pola Kemitraan Pariwisata Dalam Manajemen atraksi Desa Wisata Pampang Kota Samarinda	Ami Suswan Putra (2013)	Paradigma kemitraan menghasilkan hasil penelitian yang dapat dikategorikan sebagai kemitraan semu atau kemitraan bawahan. Pola pendampingan lebih dominan pada pola kemitraan yang meliputi hibah fisik dan finansial, serta program PNPM Mandiri Pariwisata, investasi swasta, tanggung jawab sosial perusahaan, bantuan pinjaman bergulir (KUD), subkontrak, dan perdagangan umum.
4.	“Sinergi Kemitraan Antara Pemerintah, Swasta, Dan Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Pedesaan Tanjung Di Kabupaten Sleman	RR. E. Anggraeni Eksi Wahyuni (2014)	
5.	Pola Kemitraan Pemerintah Desa Dengan Masyarakat Dalam Pengelolaan Rumah Adat Uma Ncuhi Untuk Mewujudkan Pembangunan Pariwisata Di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima	Susisusanti (2021)	Temuan studi yang dilakukan oleh RR. E. Anggraeni Eksi Wahyuni secara khusus menunjukkan sinergi yang terjalin dalam proses pengembangan desa wisata Tanjung antara pemerintah (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata), swasta (Biro perjalanan wisata), dan masyarakat (masyarakat lokal) .

Sumber : skripsi jurnal

Berdasarkan data-data diatas, penulis mengemukakan beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah sebagai berikut :

1. Penelitian yang pertama skripsi, dengan judul “Pola Kemitraan Pemerintah Daerah Dengan Kelompok Sadar Wisata Pandawa Dieng Kulon Dalam Pengembangan Pariwisata” yang disusun oleh Dyah Uswatun Khasanah (2015). Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis perbedaan lokasi, waktu, dan tempat. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pola kemitraan pemerintah dengan masyarakat sadar wisata.
2. Penelitian selanjutnya, skripsi yang berjudul “Pola Kemitraan dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah” yang disusun oleh Serly Wulandari dan Sari Indah Murwani (2018). Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis perbedaan lokasi, waktu, dan juga penelitian ini membahas tentang pola kemitraan dalam pengembangan pariwisata sedangkan penulis lebih menekankan mewujudkan masyarakat sadar wisata dan tempat persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pola kemitraan pemerintah dengan masyarakat sadar wisata. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang pola kemitraan dalam kepariwisataaan.
3. Penelitian selanjutnya, skripsi yang berjudul “Pola Kemitraan Pariwisata Dalam Manajemen Atraksi Desa Wisata Pampang Kota Samarinda” yang disusun oleh Ami Suswan Putra (2013). Pendekatan kualitatif digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Kajian ini membahas pola kemitraan pariwisata dalam pengelolaan daya tarik desa wisata, sedangkan penelitian

penulis membahas pola kemitraan antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam proses mewujudkan masyarakat sadar wisata. Perbedaan lain antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini dilakukan di lokasi dan waktu yang berbeda. Selain itu, penelitian ini berfokus pada pengelolaan daya tarik desa wisata. Baik penelitian ini maupun penelitian penulis mengeksplorasi berbagai pola kerjasama dalam industri pariwisata, yang merupakan salah satu cara untuk membandingkannya.

4. Studi selanjutnya dan tesis yang ditulis oleh RR. E. Anggraeni Eksi Wahyuni (2014) dengan judul “Sinergi Kemitraan Antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Tanjung di Kabupaten Sleman” Pendekatan kualitatif digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah perbedaan lokasi dan waktu, serta fakta bahwa penelitian ini membahas Sinergi Kemitraan antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam Pembangunan Pariwisata, sedangkan penulis membahas pola kemitraan antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat sadar wisata. Kedua penelitian tersebut dilakukan di negara yang sama, namun penelitian ini lebih fokus pada topik pengembangan pariwisata. Baik penelitian ini maupun penelitian penulis membahas topik pengembangan wisata, yang merupakan salah satu kesamaan antara kedua karya tersebut.
5. Kajian selanjutnya yang dihimpun menjadi tesis oleh Susisusanti (2021) dengan judul “Pola Kemitraan Pemerintah Desa Dengan Masyarakat Dalam Pengelolaan Rumah Adat Uma Ncuhi Untuk Mewujudkan Pembangunan

Pariwisata Di Desa Mbawa Kecamatan Donggo Kabupaten Bima” pendekatan strategi kualitatif digunakan untuk penelitian ini, yang dilakukan. Penelitian ini membahas pola kemitraan antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam pengelolaan rumah adat, sedangkan penelitian penulis membahas tentang pola kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat sadar wisata. Perbedaan lain antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah perbedaan lokasi dan waktu. Pola hubungan pemerintah dengan masyarakat dibahas baik dalam penelitian ini maupun penelitian penulis, yang merupakan salah satu persamaan antara kedua badan kerja tersebut.

2.2 Kemitraan

2.2.1 Definisi Kemitraan

Kemitraan pola kemitraan yang dijelaskan oleh beberapa ahli, menurut Hafsah (dalam Sarjana et al., 2019) “Kemitraan adalah suatu rencana usaha yang dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan mencapai keuntungan bersama atas dasar prinsip saling membutuhkan dan kemajuan bersama. Dan jika kita ingin mempercayai “Kemitraan adalah perjanjian kerjasama komersial yang melibatkan banyak pihak yang bersifat strategis, sukarela, dan didasarkan pada gagasan saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling menguntungkan seiring dengan pembinaan dan pertumbuhan perusahaan kecil dan menengah oleh perusahaan besar”

2.2.2 Pola Kemitraan

Pola kemitraan menurut Sulistiyani (dalam Melyanti, 2014) Kemitraan dilihat dari kata *Partner* dapat diterjemahkan sebagai “pasangan, jodoh, sekutu

atau kompanyon”. Kemitraan dapat dilihat sebagai semacam aliansi antara dua pihak atau sebagai bentuk kerjasama berdasarkan kesepakatan dan kebutuhan bersama untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi di sektor bisnis tertentu atau tujuan tertentu untuk mencapai hasil yang lebih baik. Secara khusus, Sulistiyani memperhatikan fakta bahwa struktur kemitraan dalam skenario ini menyimpang secara signifikan dari model konvensional. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kemitraan palsu, kadang-kadang juga disebut sebagai kemitraan palsu Sebuah "kemitraan semu" adalah sebuah aliansi yang terjadi antara dua pihak atau lebih, tetapi para pihak tidak benar-benar bekerja sama satu sama lain secara seimbang. Ungkapan "kemitraan semu" mengacu pada aliansi semacam ini. Bahkan di satu sisi, tidak ada jaminan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang memadai tentang arti persekutuan yang ada, serta alasan mengapa segala sesuatu dilakukan dan disepakati. Terlebih lagi, tidak ada jaminan bahwa mereka memahami alasan mengapa semuanya dilakukan dan disepakati. Salah satu karakteristik yang menentukan dari kemitraan semacam ini adalah kenyataan bahwa, bahkan jika pihak-pihak yang terlibat mungkin setuju atau tidak setuju tentang pentingnya kerja sama, mereka yang berpartisipasi dalam kemitraan tidak perlu mengetahui secara spesifik masalah yang ada. diperdebatkan atau aspek positif dari melakukannya. Ini adalah salah satu cara di mana kemitraan berbeda dari jenis lainnya. (Melyanti, 2014)
2. Hubungan Berdasarkan Saling Menguntungkan, Salah satu pengertian kemitraan mutualistik menggambarkannya sebagai “aliansi dua pihak atau

lebih yang sama-sama menyadari aspek penting dalam melakukan kemitraan, khususnya untuk saling memberikan keuntungan dan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak sehingga mereka dapat mencapai tujuannya dengan lebih optimal." Definisi lain menggambarkan sebagai "aliansi dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek penting dalam melakukan kemitraan."

15 Sebagai hasil dari kesadaran akan pentingnya upaya kolaboratif, dua atau lebih agen atau organisasi, yang kedudukannya mungkin sama atau berbeda, sepakat untuk bekerja sama. Dimungkinkan untuk memperoleh keuntungan dari persilangan satu sama lain di antara pihak-pihak yang bekerja sama, yang akan memudahkan masing-masing dari mereka untuk mencapai visi dan tujuan mereka, dan juga akan memungkinkan mereka untuk saling membantu pada saat yang bersamaan. (Melyanti, 2014)

3. Kemitraan dalam Konjugasi, Kehidupan "paramecium" dapat dibandingkan dengan "Kemitraan Konjugasi", yang merupakan sejenis kemitraan. Setelah mendapatkan energi melalui konjugasi, kedua paramecium kemudian terpisah satu sama lain sehingga bebas bereproduksi. Dengan menggunakan perbandingan ini sebagai titik awal, bisnis, agensi, kelompok, dan bahkan orang yang berjuang untuk memenuhi tujuan organisasi mereka atau menjalankan bisnis secara efektif dapat terlibat dalam kemitraan dengan menggunakan pendekatan ini. Konjugasi dapat terjadi antara dua pihak atau lebih untuk meningkatkan kemampuan masing-masing. (Melyanti, 2014)

Dalam bentuknya yang paling dasar, kemitraan adalah sejenis kolaborasi di mana dua pihak atau lebih bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama

dengan cara yang menguntungkan bagi mereka semua. Sumardjo (Murwani et al., 2014) disebutkan bahwa ada lima jenis pola kemitraan, yaitu :

1. Pola kemitraan inti plasma, disebut juga pola kemitraan yang dilakukan antara korporasi dengan organisasi petani atau petani perorangan. Perusahaan inti akan bertanggung jawab untuk menyediakan barang, serta tanah, fasilitas produksi, saran teknis, pengelolaan, fasilitas penyimpanan dan pemrosesan, serta pemasaran barang-barang tersebut. Sementara itu, kelompok mitra bertanggung jawab untuk memenuhi persyaratan perusahaan inti sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.
2. Pola kemitraan subkontrak, disebut juga pola kemitraan yang dilakukan antara kelompok mitra usaha dengan perusahaan yang menjadi mitra usaha. Biasanya, organisasi mitra bisnis yang dimaksud adalah organisasi yang menciptakan komponen yang dibutuhkan oleh perusahaan mitra untuk digunakan dalam pembuatan barang mereka.
3. Pola kemitraan perdagangan umum, yaitu pola kemitraan yang terjadi antara pihak pemasar dengan kelompok usaha yang menyediakan barang yang dibutuhkan pihak pemasar.
4. Pola kemitraan keagenan, yaitu pola kemitraan yang dilakukan antara perusahaan mitra dengan pemilik usaha kecil. Perusahaan mitra, yang seringkali merupakan organisasi besar, memberikan hak unik kepada usaha kecil yang bekerja sama dengannya untuk mengiklankan produk atau layanan yang disediakan oleh perusahaan mitra.

5. Pola kemitraan kerjasama operasional pertanian (KOA), yang mengacu pada pola hubungan usaha yang dikelola oleh kelompok mitra dan perusahaan mitra. Organisasi mitra bertanggung jawab atas penyediaan biaya, uang, administrasi, dan perolehan sarana produksi dalam rangka mengembangkan atau membudidayakan komoditas pertanian. Selain itu, bisnis mitra berkontribusi pada peningkatan nilai produk berdasarkan partisipasi mereka dalam pemrosesan dan pengemasan produk.

Menurut Notoatmodjo (dalam Khasanah., 2015) Kontrak untuk pekerjaan, penawaran untuk pengiriman produk atau layanan, dan *outsourcing* proses bisnis adalah bentuk khas yang mungkin diambil oleh pola kemitraan ketika mereka mengambil bentuk kerjasama pemerintah dan masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh kemungkinan model kemitraan:

1. Operasi pemeliharaan

Di sektor publik, mempekerjakan organisasi swasta untuk melakukan satu atau layanan publik selama 5-7 tahun, sektor publik sebagai penyedia layanan utama, sedangkan organisasi swasta menawarkan layanan kepada pihak luar oleh sektor publik. Selama periode ini, sektor publik bertindak sebagai penyedia layanan utama. Dalam kebanyakan kasus, pemerintah akan menggunakan proses yang melibatkan persaingan untuk memilih organisasi yang akan diberikan kontrak layanan. Keputusan pembelian perlu didasarkan pada periode implementasi yang lebih singkat dan tidak terlalu intensif sumber daya. (Khasanah., 2015)

2. Tata cara pemindahan hunian gedung

Kolaborasi semacam ini dimaksudkan untuk menarik investasi dari pihak swasta dalam proses pembangunan infrastruktur baru. Sebagai bagian dari kemitraan ini, sektor swasta akan membangun, membiayai, dan menjalankan infrastruktur dan sistem baru sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Ini akan membutuhkan waktu yang cukup bagi sektor swasta selama masa operasional untuk menutup investasinya di gedung dan menghasilkan keuntungan. Durasi operasi semacam ini adalah antara 19 dan 20 tahun. Ketika jangka waktunya berakhir, infrastruktur diserahkan kepada pemerintah dalam bentuk akhirnya. (Khasanah., 2015)

3. *Wrab around addition*

Pemerintah daerah bertanggung jawab atas desain, pembiayaan, dan konstruksi bangunan layanan publik ketika berpartisipasi dalam kemitraan sewa guna usaha. Setelah itu, fasilitas tersebut disewakan kepada pemerintah kota oleh mitra komersial sampai pemerintah secara resmi memperolehnya. Ketika pemerintah daerah ingin menawarkan fasilitas pelayanan tetapi tidak mau memberikan kontribusi keuangan, pendekatan ini digunakan. (Khasanah., 2015)

4. Pelayanan yang berakar pada *masyarakat*

Pemerintah tidak dapat memberikan layanan yang cukup kepada lingkungan sekitar saat kerja sama ini pertama kali dimulai karena keterbatasan anggaran. Kolaborasi ini juga mendorong individu dalam

komunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dalam pengertian yang paling lokal, kemitraan ini dapat mencakup orang, keluarga, atau bisnis. (Khasanah., 2015)

2.2.3 Faktor-Faktor Kemitraan

2.2.3.1 Faktor Komunikasi

Menurut Anderson (dalam Nusantara et al., 2018) Istilah "komunikasi" dapat merujuk pada metode pertukaran informasi formal atau informal antara bisnis, dengan tujuan membuat informasi lebih berharga dan lebih terkini. Menurut Mohr (dikutip dalam Nusantara et al., 2018), dapat dicermati bahwa setidaknya ada tiga jenis komunikasi yang saling melengkapi satu sama lain. Jenis komunikasi ini meliputi frekuensi komunikasi, komunikasi dua arah, dan konten non-koersif.

2.2.3.2 Faktor Kerjasama

Menurut Anderson (dalam Ardiansyah & Aulawi, 2020) Kerjasama, dalam bentuknya yang paling mendasar, dapat dilihat sebagai semacam keinginan di pihak kedua belah pihak (perusahaan dan pedagangnya) untuk berusaha berkoordinasi satu sama lain untuk mencapai hasil yang lebih baik. Temuan studi yang dianalisis sendiri oleh Smith (dalam Ardiansyah & Aulawi, 2020) menunjukkan bahwa kolaborasi memiliki dampak menguntungkan pada efisiensi koneksi pemasaran..

2.2.3.3 Faktor Kepercayaan

Menurut Moorman (dalam Melyanti, 2014) kepercayaan dapat didefinisikan sebagai kesediaan satu pihak untuk bergantung pada pihak lain

untuk penyelesaian suatu tugas. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Morgan yang disampaikan dalam Melyanti (2014). Morgan berpandangan bahwa kepercayaan berkembang sebagai konsekuensi ketergantungan dan integritas mitra, yang ditunjukkan melalui berbagai sikap termasuk konsistensi, kompetensi, keadilan, tanggung jawab, membantu, dan peduli. Ketika perusahaan menunjukkan pengetahuan dan ketergantungannya, itu akan mendapatkan kepercayaan pengecer, yang penting dalam konteks hubungan antara perusahaan dan pengecer. Menurut Anderson, yang dikutip dalam Narus (2015), kepercayaan merupakan komponen penting dalam proses pengembangan hubungan kerjasama, serta landasan di mana hubungan dibangun dan dipertahankan. Untuk membangun kepercayaan, pertama-tama harus ada keinginan dari pihak pengecer perantara untuk berpartisipasi dalam semua tindakan dalam sektor pemasaran yang diarahkan untuk membangun, mengembangkan, dan memelihara hubungan perdagangan yang produktif antar bisnis. Di bidang pemasaran, dedikasi dan kepercayaan adalah dua faktor terpenting yang menentukan efektivitas inisiatif pemasaran. Sementara ini terjadi, Morgan menyatakan bahwa di bawah model transaksional, di satu sisi, pembeli dan penjual dapat melakukan transaksi yang berulang dari waktu ke waktu, yang mengarah pada hubungan jangka panjang. Ini menurut Hunt (2019). Hal ini dimungkinkan karena fakta bahwa itu dibangun di atas dasar kepercayaan yang kuat. Smith, seperti dikutip dalam Melyanti (2014). Karena persaingan yang ketat di dunia bisnis saat ini, organisasi dituntut untuk memupuk ikatan yang kuat dengan klien mereka. Perusahaan dapat

mengembangkan taktik pemasaran yang lebih efektif ketika mereka memupuk hubungan dengan klien mereka.

2.2.3.4 Faktor Komitmen

Menurut Pradana dan Hilman 2020, komitmen dapat dilihat sebagai janji atau ikrar untuk mempertahankan suatu hubungan yang telah terjalin selama ini karena hubungan tersebut memiliki makna yang signifikan. Menurut pandangan Dawyer, seperti yang dipaparkan dalam Pradana dan Hilman 2020, konsep komitmen adalah janji atau ikrar untuk menjaga hubungan dengan pasangan. Definisi ini konsisten dengan sudut pandang tersebut. Hal ini sesuai dengan sudut pandang yang dikemukakan oleh Monezka (dalam Pradana dan Hilman, 2020). Ditegaskan bahwa untuk mendemonstrasikan dedikasi yang sebenarnya diperlukan pembuktian yang spesifik, seperti penghargaan, uang, fasilitas, dan sebagainya.

2.3 Pariwisata

2.3.1 Definisi Pariwisata

Bila dilihat dari segi etimologis Pariwisata berasal dari Bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata yaitu “Pari” dan “Wisata”. Oleh Suwarjoko (dalam Emi Salmah et al., 2021), *Association Internationale des Experts Scientifique du Tourisme (AIEST)* mendefinisikan pariwisata sebagai totalitas interaksi dan fenomena yang terjadi akibat perjalanan dan tinggal (*stay*) para pendatang. Namun, yang dimaksud dengan warisan tidak berarti tetap ada.

Kodyat (dikutip dalam Yatmaja, 2019) mengatakan hal yang sama, dan mendefinisikan pariwisata sebagai “perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan secara individu atau kelompok, sebagai upaya untuk menemukan keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan. dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmiah.” Pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan secara perorangan atau berkelompok. Perspektif lain yang disampaikan oleh Wahab (dalam Yatmaja, 2019) adalah bahwa pariwisata merupakan jenis usaha baru yang mampu memberikan perkembangan ekonomi yang pesat dalam hal penyediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan taraf hidup, serta mendorong jenis-jenis sektor produktif lainnya.

Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009 yang disahkan oleh Republik Indonesia mengatur bahwa:

1. Pariwisata adalah suatu kegiatan perjalanan yang dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang terdiri dari pergi ke lokasi tertentu untuk tujuan kesenangan, pengembangan diri, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi untuk jumlah waktu yang terbatas.
2. Orang yang melakukan perjalanan disebut sebagai wisatawan.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan yang ditopang oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat setempat, pengusaha lokal, pemerintah, dan pemerintah daerah.

2.3.2 Destinasi Wisata

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Di bidang Kepariwisata ditetapkan bahwa Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang termasuk dalam satu atau lebih wilayah administrasi dan memiliki masyarakat, daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, dan aksesibilitas yang saling berhubungan dan mendukung keberhasilan pariwisata. Pertumbuhan suatu kawasan pariwisata juga tergantung pada atraksi dan aktivitas yang dapat ditemukan di sana untuk dinikmati pengunjung. Hal ini tidak lepas dari tanggung jawab pengelola kawasan wisata. (Kurniawan et al., 2021).

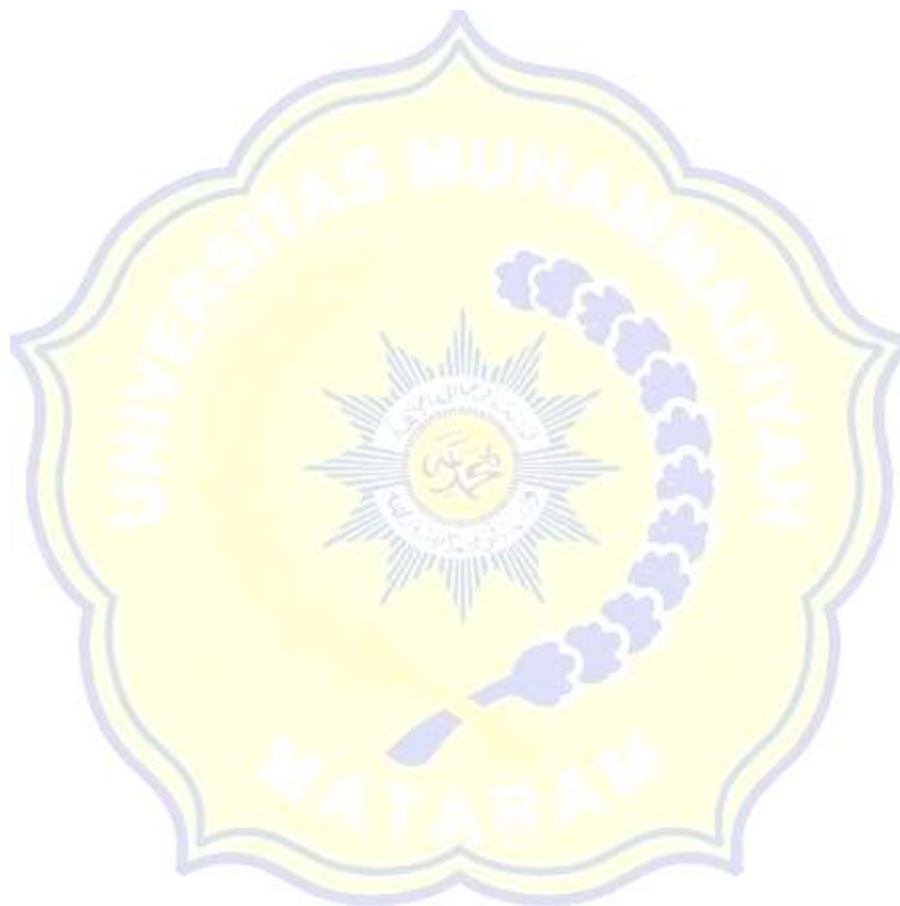
Yoeti (dalam Karim et al., 2017) berpendapat bahwa keberhasilan suatu daerah tujuan wisata hingga berkembangnya suatu industri sangat ditentukan oleh tiga A, yaitu daya tarik, aksesibilitas, dan fasilitas (amenities). Menurut Kurniawan dkk. (2023), daya tarik wisata adalah hal-hal yang direncanakan dalam persiapan agar dapat dilihat dan dinikmati oleh pengunjung. Beberapa contoh daya tarik wisata antara lain tarian, nyanyian, kesenian rakyat tradisional, ritual adat, dan kegiatan sejenis lainnya. Pariwisata juga disebut sebagai “spontanitas atraktif” yang mengacu pada segala sesuatu yang dapat ditemukan di suatu lokasi yang dianggap sebagai tujuan wisata yang berfungsi sebagai daya tarik dan mendorong orang untuk pergi ke sana. Karena pengaruh unsur-unsur seperti jarak dan waktu terhadap keinginan seseorang untuk melakukan perjalanan, aksesibilitas merupakan aspek pariwisata yang sangat bergantung, sebagian besar, pada metode transportasi dan komunikasi. Transportasi adalah satu-satunya faktor terpenting dalam hal aksesibilitas karena membawa jarak ke jangkauan yang lebih

mudah diatur. Jalan, jembatan, terminal, stasiun, dan bandara merupakan contoh infrastruktur yang berkontribusi terhadap aksesibilitas di luar konteks transportasi. Tujuan dari infrastruktur ini adalah untuk menghubungkan banyak lokasi satu sama lain. Laju tingkat transportasi itu sendiri sedikit banyak akan dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur transportasi. Ketika dalam kondisi prima, infrastruktur transportasi akan memungkinkan efisiensi waktu perjalanan sebesar mungkin. Tidak akan ada perbedaan yang dibuat antara akomodasi turis dan perhotelan untuk fasilitasnya. Fasilitas bagi wisatawan adalah segala sesuatu yang memberikan kontribusi terhadap tingkat kenyamanan keseluruhan yang mungkin terdapat pada suatu tempat yang dikunjungi oleh wisatawan. Fasilitas penting dalam kaitannya dengan pengembangan pariwisata meliputi tempat tinggal, tempat makan, sumber air minum, sarana komunikasi dan hiburan, serta sarana keselamatan.

2.3.3 Aktor Yang Berperan Dalam Pembangunan Kepariwisata

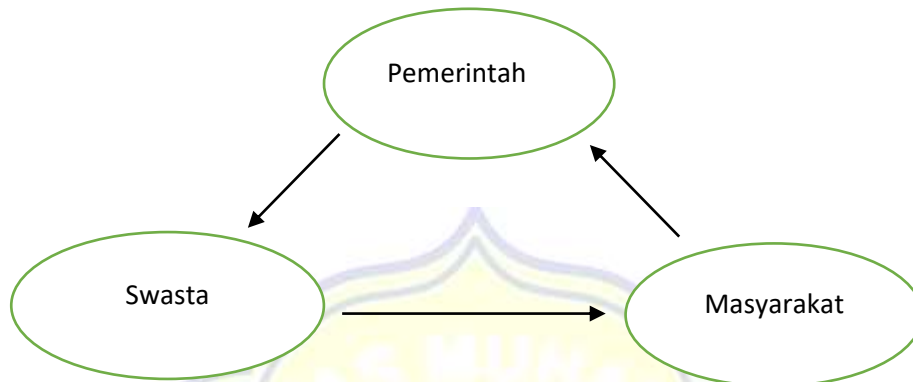
Good governance adalah sebuah gambaran ideal tentang bagaimana mengelola negara dan aspek-aspek terkait lain yang ada di dalamnya (Widayat et al., 2023). Untuk mewujudkan *good governance*, Menurut penelitian Ajie et al. dari tahun 2020, diperlukan pengelolaan administrasi pemerintahan yang efektif dan dapat diandalkan, yaitu pengelolaan yang memungkinkan, responsif, dan adaptif. Agar ada tata kelola yang efektif, tidak boleh ada satu pihak pun yang memiliki kendali penuh atas segalanya. Ini akan membantu memastikan bahwa ada keseimbangan yang sehat antara banyak pemangku kepentingan dengan memastikan bahwa prinsip-prinsip fundamental diikuti. Ada banyak pemain

berbeda di sektor pariwisata, dan masing-masing dari mereka berperan dalam menjaga agar sistem tetap berjalan. Orang-orang yang terlibat dengan pariwisata dari berbagai bidang membentuk para pemain ini. Orang yang bekerja di industri pariwisata seringkali dibagi menjadi tiga kategori berbeda, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.



Gambar 2.1

Tiga pilar utama



2.3.4 Sadar Wisata

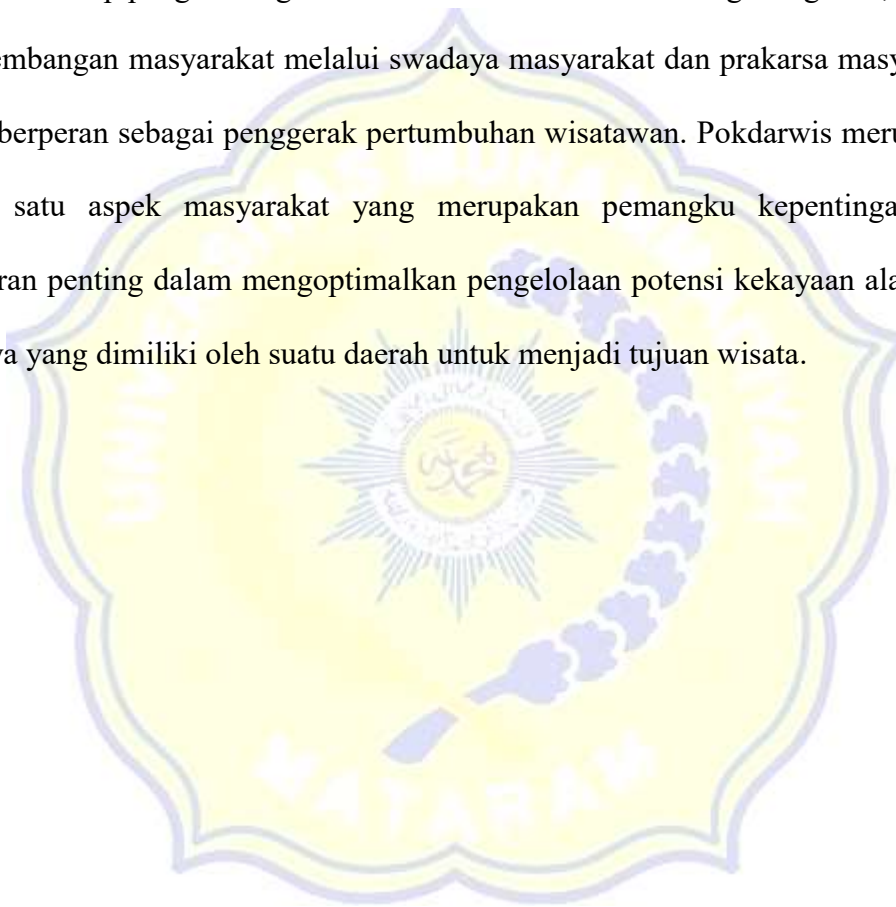
1. Sadar Wisata menurut Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (dalam Karim et al., 2017) bahwa “Sadar Wisata adalah suatu kondisi yang mencirikan keterlibatan dan dukungan masyarakat dalam mendukung terciptanya suasana yang cocok bagi pertumbuhan dan perkembangan pariwisata di suatu destinasi atau kawasan. Kondisi ini bisa bersifat positif atau negatif, tergantung bagaimana masyarakat melihatnya”. Menurut Rahim (dalam Karim et al., 2017) sadar wisata dalam hal ini digambarkan sebagai bentuk kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam 2 (dua) hal berikut, yaitu:
 - a. Masyarakat sadar akan tugas dan kewajibannya sebagai tuan rumah yang baik bagi pengunjung atau wisatawan yang berkunjung agar tercipta lingkungan dan suasana yang kondusif, sebagaimana tertuang dalam motto Sapta Pesona. Ini diperlukan untuk menyediakan lingkungan dan suasana yang ramah.

- b. Masyarakat sadar akan hak dan kebutuhannya menjadi pelaku wisata atau wisatawan untuk pergi ke suatu lokasi wisata, sebagai salah satu kebutuhan mendasar untuk berekreasi dan khususnya dalam mengenal dan mencintai tanah air. Pelaku wisata dan wisatawan sadar akan hak dan kebutuhannya untuk ikut serta dalam pariwisata.

Membangun dan membina lembaga wisata yang handal merupakan salah satu cara untuk berkontribusi dalam penguatan Desa Wisata Rempek. Alhasil, dibentuklah Kelompok Sadar Wisata yang disebut Pokdarwis sebagai perpanjangan tangan Dinas Pariwisata. Pokdarwis mempunyai tugas dan fungsi sebagai motivator, penggerak, dan komunikator dalam upaya meningkatkan tingkat kesiapsiagaan dan kesadaran yang dimiliki warga Desa Wisata Rempek dalam pengelolaan, pelestarian, dan pemanfaatan potensi alam yang berfungsi sebagai objek wisata. Sebagai organisasi yang membawahi operasional pariwisata, Pokdarwis memberikan dukungan dan arahan kepada anggota masyarakat tentang sektor pariwisata. Selain itu, membuat paket wisata dan melakukan kampanye untuk mengekspos objek wisata yang berada di Desa Wisata Rempek melalui berbagai bentuk media massa. Sebagai pelaku dalam promosi pariwisata, kelompok sadar wisata ini dikenal sebagai fasilitator. Disebut fasilitator karena banyak Pokdarwis yang mampu memberikan fasilitas penunjang kepada kepala Dinas Pariwisata.

Menurut Rahim (2012, online) dalam Surya Arif Wijaya, Zulkarnain, Sopingi (2016) Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) merupakan salah satu aspek masyarakat yang berperan penting dalam pengembangan pariwisata di daerah dan

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap usaha tersebut. Dalam penelitian Surya Arif Wijaya, Zulkarnain, dan Sopingi (2016), Rahim (2012, online) mengklaim hal tersebut. Salah satu dari beberapa pendekatan pengembangan wisata yang terkait dengan kampanye sadar wisata adalah kelompok sadar wisata atau dikenal dengan pokdarwis. Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) bertanggung jawab terhadap pengembangan wisata nusantara melalui berbagai kegiatan, seperti pengembangan masyarakat melalui swadaya masyarakat dan prakarsa masyarakat yang berperan sebagai penggerak pertumbuhan wisatawan. Pokdarwis merupakan salah satu aspek masyarakat yang merupakan pemangku kepentingan dan berperan penting dalam mengoptimalkan pengelolaan potensi kekayaan alam dan budaya yang dimiliki oleh suatu daerah untuk menjadi tujuan wisata.



2.4 Kerangka Berfikir Penelitian

Berdasarkan pada teori yang dibahas diatas, maka kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada Bagan 2.1 dibawah ini.

Gambar 2.2
Kerangka Berfikir Penelitian :



2.5 Definisi Konseptual

1. Kemitraan

Kemitraan adalah suatu kerjasama usaha formal yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah atau besar untuk mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip bersama.

2. Pariwisata

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

2.6 Definisi Operasional

Sugiyono (2015:31) mengemukakan Proses mengubah konstruk atau karakteristik yang akan diselidiki menjadi variabel yang dapat diukur atau diidentifikasi dikenal dengan istilah operasionalisasi. Definisi ini mendefinisikan strategi khusus yang digunakan untuk menyelidiki dan mengoperasikan konstruksi untuk memungkinkan peneliti lain menduplikasi pengukuran dengan cara yang sama atau menciptakan cara yang lebih baik untuk mengukur konstruksi.

A. Aspek-aspek Pola Kemitraan Pemerintah Desa Dengan Masyarakat Dalam Mewujudkan Masyarakat Sadar Wisata

1. Operasi-pemeliharaan

a) Penyedia pelayanan

Penyedia jasa adalah pihak yang dapat memberikan jasa tertentu kepada pelanggan, baik berupa jasa dalam bentuk penyediaan dan

penyerahan produk atau jasa. Penyedia jasa juga dapat memberikan jasa dalam bentuk jasa berupa penyediaan dan penyerahan barang atau jasa.

b) Kontrak layanan

Kontrak layanan adalah perjanjian antara dua pihak, khususnya penyedia layanan dan konsumen layanan, yang menentukan kegiatan layanan yang akan dilakukan..

2. Bangunan-transfer-operasi

a) Investasi sektor

Salah satu jenis investasi di mana aset yang diinvestasikan bersifat fisik. Artinya, bentuk dan jumlahnya dapat dilihat dengan cukup jelas. Investasi di sektor riil mencakup hal-hal seperti membeli properti atau emas, serta membeli saham di perusahaan yang bergerak di industri riil.

b) Memastikan infrastruktur beroperasi

Istilah "infrastruktur operasi" mengacu pada pengelolaan semua struktur dan fasilitas dasar, baik fisik maupun sosial, yang diperlukan untuk operasi masyarakat dan operasi perusahaan. Struktur dan fasilitas ini mencakup hal-hal seperti bangunan, suplai listrik, irigasi, jalan, jembatan, dan sebagainya.

3. *Wrab Around Addition*

a) Fasilitas publik

Fasilitas publik merupakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk kepentingan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya.

b) Kerjasama

Kerjasama adalah sebuah sikap mau melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama tanpa melihat latar belakang orang yang diajak bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan.

4. Sewa-beli

a) Pembiayaan

Pembiayaan merupakan dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang / aset / jasa tertentu yang mekanisme umumnya melibatkan tiga pihak yaitu pihak pemberi pendanaan, pihak penyedia barang/ aset/ jasa tertentu, dan pihak yang memanfaatkan barang/ aset/ jasa tertentu.

b) Fasilitas pelayanan

mekanisme dan lokasi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan prakarsa pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

5. Pelayanan berbasis masyarakat

a) Kemitraan individual

Kemitraan Individu adalah suatu bentuk kerjasama atau aliansi antara dua pihak atau lebih yang saling menguntungkan satu sama lain dalam jangka waktu tertentu guna mewujudkan tujuan bersama untuk

mencapai hasil yang lebih baik dan mampu meningkatkan daya saing. Kemitraan Individual adalah suatu bentuk kerjasama atau aliansi antara dua pihak atau lebih yang saling menguntungkan satu sama lain dalam jangka waktu tertentu.

b) Perusahaan ruang

Perusahaan ruang adalah wadah usaha untuk melakukan sesuatu kegiatan

B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pola kemitraan

1. Komunikasi

a) Sarana formal

Sarana formal adalah aturan, prosedur baku, yang mengikat setiap negara baik secara nasional maupun internasional.

b) Frekuensi komunikasi

Frekuensi komunikasi adalah Intensitas Komunikasi dalam organisasi

2. Kerjasama

a) Upaya koordinasi

Upaya Koordinasi adalah sebuah proses dalam menyatukan dan mengintegrasikan kepentingan bersama.

c) Hubungan pemasaran

Hubungan Pemasaran adalah cara usaha pemasaran pada pelanggan yang meningkatkan pertumbuhan jangka panjang perusahaan dan kepuasan maksimum pelanggan.

3. Kepercayaan

a) Integritas mitra

Integritas mitra adalah suatu konsep yang berkaitan dengan perilaku, nilai, metode, sarana, prinsip, harapan, dan keterpaduan berbagai hasil.

b) Strategi pemasaran

Seluruh upaya perusahaan dapat disimpulkan sebagai strategi pemasarannya. Tujuannya adalah untuk berkomunikasi dengan calon pelanggan atau klien. Setelah itu, pendekatan pemasaran akan mengubah mereka menjadi konsumen yang konsisten.

4. Komitmen

- a. Hubungan rekanan adalah hubungan hukum yang didasarkan atas perjanjian persekutuan. Hubungan semacam ini melibatkan kerja sama langsung dan tidak langsung dalam kontak komersial atas dasar prinsip saling membutuhkan, percaya, memperkuat, dan menguntungkan.
- b. Bukti fasilitas segala sesuatu yang kelihatan yang dapat memampukan dan mempercepat pelaksanaan suatu usaha; sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan atau memperlancar suatu kegiatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif Menurut Sutinah, (dalam Fadli, 2021) merupakan proses, penelitian yang berkesinambungan dari tahap pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data dilakukan bersamaan selama proses penelitian.

3.2 Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan Di Kantor Desa Rempek Kabupaten Lombok Utara. Tepatnya di Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara dan Teknik dalam penentuan penelitiannya yaitu menggunakan teknik Proposive Sampling. Penulis memilih lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan lokasi yang sangat tepat untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan.

3.3 Fokus Kajian

Fokus kajian pada penelitian ini adalah, terkait dengan Pola Kemitraan Pemerintah Desa Dengan Masyarakat Dalam Mewujudkan Desa Sadar Wisata Di Desa Rempek Kabupaten Lombok Utara.

3.4. Waktu Penelitian

Penelitian ini lakukan selama 3 Bulan mulai dari tanggal 01 Februari sampai dengan 01 Mei 2023 di Desa Rempek Kabupaten Lombok Utara.

3.5.Sumber dan Jenis Data

- a) Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dilapangan dari informan melalui observasi dan wawancara. seperti hasil *survey* dan kuesioner terhadap responden.
- b) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber resmi, dokumen-dokumen yang ada dilokasi penelitian serta *literature* yang ada relevansinya dengan obyek penelitian ini. Seperti, majalah, surat kabar, brosur, data sensus penduduk dan data yang dikeluarkan oleh pemerintah.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data merupakan tahapan paling kritis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk mengumpulkan data yang benar. Oleh karena itu, jika peneliti tidak mengetahui cara mengumpulkan data, maka tidak akan dapat memperoleh data yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sugiyono (Fadli, 2021)

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Moleong (2014:186), wawancara merupakan Suatu diskusi yang mempunyai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh dua orang, yaitu pewawancara (interviewer), yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee), yang menawarkan jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan. Para peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik yang dikenal sebagai wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara

yang dibandingkan dengan wawancara terstruktur, memiliki tingkat fleksibilitas yang lebih besar dalam pelaksanaannya.

Pewawancara akan mengajukan pertanyaan kepada informan, tetapi pertanyaan tersebut dapat bergeser dan menjadi lebih terbuka berdasarkan keadaan dan informasi yang diperlukan dari informan. Menurut Sugiyono (2016: 233), tujuan dari wawancara semi-terstruktur adalah untuk mengungkap permasalahan secara lebih lugas dengan menanyakan pemikiran dan pandangan pihak yang diwawancarai.

Menurut Sugiyono (2010), observasi adalah teknik atau cara untuk menelaah dan menghasilkan catatan yang dilakukan secara sistematis. Metode atau cara ini tidak terbatas pada individu, tetapi juga dapat digunakan untuk hal-hal alam lainnya.

2. Pendekatan observasi

Pendekatan observasi diperlukan untuk strategi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Keuntungan menggunakan teknik observasi dalam penelitian kualitatif adalah memungkinkan peneliti untuk menyaksikan sendiri fenomena yang terjadi selama penelitian. Peneliti kemudian dapat mendokumentasikan perilaku dan peristiwa saat itu benar terjadi. Moleong, dengan Guba dan Lincoln di sana. (2014: 174)

3. Dokumentasi

Dokumen adalah rekaman peristiwa yang terjadi di masa lalu dan dapat berupa teks, gambar, atau karya raksasa yang dibuat oleh satu individu. Catatan tertulis, seperti jurnal, riwayat hidup, biografi, aturan,

dan kebijakan, di antara jenis dokumentasi tertulis lainnya. rekaman yang disajikan dalam bentuk visual, seperti foto, film gerak, gambar, dan rekaman sejenis lainnya. dokumen yang disajikan dalam bentuk karya, seperti karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, video, dan lain sebagainya. Studi dokumen merupakan tambahan yang berguna untuk teknik penelitian yang lebih tradisional seperti observasi dan wawancara (Sugiyono, 2016: 240).

Untuk menganalisis keadaan objek alam (kebalikan dari melakukan eksperimen), penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang didasarkan pada aliran filsafat postpositivisme dan menggunakan peneliti sebagai instrumen utama. sumber informasi dalam penelitian adalah:

Tabel 3.1
Daftar Informan

NO.	Informan	Jumlah
1.	Kepala Desa	1 Orang
2.	Sekretaris Desa	1 Orang
3.	Staff Desa	5 Orang
4.	Pokdarwis	3 Orang
5.	Masyarakat	7 Orang
Jumlah		17 rang

3.7 Teknik Analisis Data

Sugiyono (2016: 244) mengatakan bahwa analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data secara metodis, dengan data diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Ini melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori, menggambarkannya ke dalam unit, mensintesisnya, menyusunnya menjadi pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan menarik kesimpulan dengan cara yang mudah dipahami oleh peneliti dan orang lain. .

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data yang termasuk dalam model lapangan yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Metode ini disebut juga dengan teknik analisis data interaktif karena mengharuskan analisis data dilakukan secara interaktif dan terus menerus hingga selesai sehingga mengakibatkan data menjadi jenuh. Kegiatan pengumpulan data, reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*presentasi data*), dan penarikan kesimpulan atau penarikan kesimpulan/verifikasi termasuk dalam proses analisis data sesuai dengan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Penjelasannya akan seperti ini:

a) Pengumpulan data

Pengumpulan data yang disajikan dalam bentuk kata-kata bukan angka dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan, termasuk observasi, wawancara, intisari dokumen, kaset, dan rekaman. Data ini biasanya ditangani dengan merekam, mengetik, mengedit, atau transkripsi.

b) *Data Reduction* (Reduksi data)

Karena data yang diterima dari lapangan cukup banyak dan harus didokumentasikan dengan baik dan detail, maka perlu dilakukan pengurangan jumlah data dengan meringkasnya, memilih item yang paling signifikan, berkonsentrasi pada hal-hal yang vital, dan mencari, untuk tema dan pola. Dengan melakukan reduksi data, akan tersaji gambaran yang lebih akurat, dan peneliti akan lebih mudah melakukan pengumpulan data dan mencarinya jika diperlukan. Dengan menetapkan kode ke berbagai karakteristik data, reduksi data dapat dilakukan dengan bantuan komputer.

c) *Data Display* (penyajian data)

Tahap selanjutnya, setelah data direduksi adalah menampilkan data. Saat melakukan penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam berbagai cara, termasuk namun tidak terbatas pada deskripsi singkat, bagan, hubungan antar kategori dan perangkat serupa. Teks naratif adalah metode penyajian yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif.

d) *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Tahap ketiga adalah membuat kesimpulan dan kemudian memverifikasi kesimpulan tersebut. Menemukan signifikansi dari fakta-fakta yang telah diberikan merupakan langkah pertama untuk sampai pada suatu kesimpulan. Setelah pengumpulan data, kesimpulan dihasilkan, yang kemudian diperiksa keakuratannya dan dianggap sah setelah dilakukan verifikasi dan pengujian. Untuk melakukan analisis terhadap studi tersebut di atas, penulis

menggunakan teknik data kualitatif sebagai berikut: analisis data berasal dari informasi yang dikumpulkan selama proses pengumpulan data, seperti catatan dan catatan, wawancara dan keterlibatan. (Rohmadi dan Nasucha, 2015:34).

3.8. Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk menunjang penelilitain ini perlu di telusuri keabsahan data baik berupa Teori, Metode, Sumber, sehingga Analisis data bersifat induktif dan kualitatif dan temuan penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Pengambilan sampel sumber data dilakukan secara Skripsi dan snowbaal, prosedur pengumpulan, dengan triangulasi (gabungan).

